

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) KOTA MEDAN

Dilli Asril

Email : dilli@student.usu.ac.id

Jl. T.M. Hanafiah No. 1 Program Studi Magister Studi Pembangunan
Universitas Sumatera Utara

Diterima 15 Agustus 2013/ Disetujui 30 Agustus 2013

Abstract

Micro, small and medium enterprises (SMEs) are the supporting system of the economy of the people who are expected to become an integral part of the people economy. SMEs are also expected to overcome the obstacles that poverty. One of the participating office are implement eradication program is Dinas Koperasi dan UMKM Medan, in 2012 has implemented several programs supporting reduce poverty in the city of Medan. Type research descriptive and techniques of collecting data with an informer a lock (key informen) and a questionnaire to 50 people msms picking up medan with uses the technique ball of snow. The results of research shows the existence of different activity that is performed dept. of cooperatives to develop msms with convention of various seminars and training to increase knowledge and skill

Keywords: Small medium and micro enterprises, Empowerment, Training, Capacity building

Abstrak

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan sistem pendukung perekonomian rakyat yang diharapkan dapat menjadi bagian integral dari perekonomian rakyat. UMKM juga diharapkan mampu mengatasi kendala klasik pembangunan yaitu kemiskinan. Salah satu Dinas yang ikut melaksanakan program pemberantasan kemiskinan di Kota Medan adalah Dinas Koperasi UMKM yang pada tahun 2012 telah melaksanakan beberapa program pendukung dalam penanggulangan kemiskinan Kota Medan. Tipe penelitian bersifat deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan informan kunci (Key Informan) dan kuesioner kepada 50 orang UMKM di kota medan dengan menggunakan teknik bola salju. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi untuk mengembangkan UMKM dengan diadakannya berbagai seminar dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Katakunci : Usaha menengah kecil dan mikro, Pemberdayaan, Pelatihan, Peningkatan kapasitas

PENDAHULUAN

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang

dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan (Bappenas : 2004).

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan telah menjadi permasalahan global, sehingga diperlukan penanganan secara terpadu dan berkelanjutan. Perlu adanya integritas, sinergitas dan dukungan dari semua pihak dalam mengentaskan kemiskinan. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kota, Pihak Swasta, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan *stakeholder* lainnya secara kolektif harus duduk bersama dalam melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan, khususnya masyarakat miskin. Dibutuhkan kebijakan yang strategis dalam penanganan kemiskinan sesuai dengan potensi dan kebutuhan warga miskin (Ditjen PMD Depdagri : 2006).

Permasalahan kemiskinan bersifat multi dimensional dan semakin disadari tidak hanya sekedar masalah ekonomi-keuangan yang berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh pendapatan maupun kemampuan membeli barang dan jasa (pengeluaran). Nobel Amartya Sen yang mengungkapkan bahwa seseorang yang miskin menderita akibat keterbatasan kemampuan (*capabilities*), kesempatan (*opportunities*) dan kebebasan (*freedoms*). Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa krisis multidimensional yang terjadi pada periode 1997-1998 telah membalikkan trend penurunan kemiskinan dan menyebabkan angka kemiskinan melonjak hingga mencapai 49,50 juta jiwa (atau 24,23%) pada tahun 1998. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia (1996-2012), secara bertahap angka kemiskinan terus menurun menjadi 35,10 juta atau 15,97% (2005), 32,53 juta atau 14,15% (2009), dan padabulan September 2012 menjadi 28,59 juta jiwa atau 11,66% dari populasi penduduk. Angka kemiskinan yang dilansir oleh BPS tersebut menggunakan *nilai garis kemiskinan*, dimana penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori/kapita/hari dan non makanan, yaitu perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Meskipun Program Pengentasan Kemiskinan terus ditingkatkan, namun tidak

dapat dipungkiri bahwa kantong-kantong kemiskinan masih tetap ada. Hal ini dapat dilihat dalam sebaran kemiskinan, dimana jumlah penduduk miskin lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa (55,33%) dan Sumatera (21,6%), diikuti oleh Pulau Sulawesi (7,15%), Bali & Nusa Tenggara (6,90%), Maluku dan Papua (5,69%) serta Kalimantan (3,26%) (Setneg.go.id).

Persebaran kemiskinan berdasarkan Provinsi, bahwa angka kemiskinan terbesar terdapat di Jawa Timur (4,96 juta), Jawa Tengah (4,86 juta) dan Jawa Barat (4,42 juta). Beberapa provinsi di luar Pulau Jawa yang memiliki penduduk miskin lebih dari 1 juta jiwa adalah Sumatera Utara (1,37 juta), Lampung (1,21 juta), Sumatera Selatan (1,04 juta) dan NTT (1,00 juta). Sedangkan angka kemiskinan terendah dijumpai di Kepulauan Riau (131 ribu), Maluku Utara (88 ribu) dan Bangka Belitung (70 ribu). (Setneg.go.id).

Mencermati tingkat dan jumlah kemiskinan yang bervariasi di masing-masing Provinsi, maka efektivitas program pengentasan kemiskinan tidak dapat lepas dari peranan aktif Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Secara konseptual Strategi Pengentasan Kemiskinan Nasional (*National Poverty Reduction Strategy*) adalah penting namun tidak mencukupi. Diperlukan partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk mempertajam program dan target penerima sasaran melalui Strategi Pengentasan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang mencakup inisiatif dan kearifan lokal. (Setneg.go.id)

Sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan tidak dapat terhindar dari fenomena kemiskinan. Sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, Kota Medan masih dihadapkan pada satu masalah penting yakni, persoalan kemiskinan. Berdasarkan data yang dilansir Bappeda Kota Medan dari Badan Pusat Statistik (BPS), terhitung

per 1 Januari 2011, jumlah warga miskin di Kota Medan bertambah menjadi 9,92% dari 6,40% pada 2010 (BPS, Kota Medan, 2012). Pembangunan Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara saat ini berkembang pesat dan mengakibatkan pertambahan penduduk, keadaan ini antara lain disebabkan oleh pertumbuhan penduduk secara alami dan terjadinya migrasi dari desa ke kota (urbanisasi) dengan tujuan mencari kerja. Pertumbuhan penduduk usia produktif membutuhkan lapangan pekerjaan sebagai kebutuhan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Lapangan kerja di sektor formal masih sulit diharapkan untuk menjadi tumpuan dalam mengurangi angka pengangguran secara signifikan. Bahkan dikhawatirkan, lapangan kerja di sektor formal tersebut akan menjadi mesin pencetak pengangguran baru akibat pemutusan hubungan kerja sebagai dampak krisis ekonomi saat ini.

Kemiskinan perkotaan merupakan salah satu isu pembangunan yang kompleks dan kontradiktif. Kemiskinan dipandang sebagai dampak ikutan dari pembangunan dan bagian dari masalah dalam pembangunan. Tipologi kemiskinan perkotaan dicirikan oleh berbagai dimensi baik dimensi sosial maupun ekonomi yang lebih beragam serta memiliki kebijakan yang rumit. Hal tersebut membentuk pola kemiskinan yang berbeda-beda. Sebagai contoh Program pengentasan kemiskinan di kota Medan, Sumatera Utara, belum berhasil menekan jumlah penduduk miskin. Sebab, dari 151 kelurahan, 147 di antaranya masih banyak dihuni warga miskin. (waspada.co.id, 2013). Dari 151 Kelurahan di Kota Medan, lima kelurahan dengan penduduk miskin terbesar yaitu Belawan I total penduduk miskin 10813 orang, Belawan II total penduduk miskin 10184 orang, Rengas Pulau total penduduk miskin 8755 orang, Labuhan Deli total penduduk miskin 8660 orang dan Pekan Pelabuhan total penduduk miskin 7246 orang. Selebihnya, jumlah penduduk

miskin di Kota Medan tersebar di setiap kelurahan. (Pemerintah Kota Medan, 2013).

Kondisi ini melahirkan keterbelakangan baik secara sosial maupun ekonomi dan sehubungan itu, program pengurangan angka kemiskinan menjadi prioritas dalam RPJM Kota Medan 2010-2015. Salah satu upaya yang dilakukan dengan mendorong masyarakat miskin untuk meningkatkan derajat kehidupannya melalui bantuan modal dan pelatihan-pelatihan ketrampilan. Namun pengurangan angka kemiskinan bukanlah hal yang mudah, sebab persoalan kemiskinan itu sangat kompleks sehingga harus dilaksanakan lewat sinergitas dan kebersamaan semua pihak untuk menanggulangnya. Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam penanggulangan kemiskinan yang juga sudah dilakukan adalah dengan mengadakan pertemuan bersama pimpinan bank yang ada di kota ini. Dalam pertemuan itu pimpinan bank diharapkan bisa menyalurkan dana *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) kepada masyarakat kurang mampu sebagai modal usaha. Upaya pengentasan kemiskinan perlu dilakukan Pemerintah Kota Medan melalui kebijakan dan Program Berbasis pada Pemberdayaan Masyarakat, yang mana target Pemerintah Kota Medan penurunan minimal 2% per tahun di Kota Medan dapat tercapai

Salah satu Dinas yang ikut melaksanakan program pemberantasan kemiskinan di Kota Medan adalah Dinas Koperasi UMKM yang pada tahun 2012 telah melaksanakan beberapa program pendukung dalam penanggulangan kemiskinan Kota Medan. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan kapasitas dan pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil menengah di Kota Medan.

Berdasarkan latarbelakang diatas maka dirumuskan masalah penelitiannya yaitu bagaimanakah Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan

Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Medan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian bersifat deskriptif, penelitian dilakukan di Dinas Koperasi UMKM Pemerintah Kota Medan. Informan terdiri dari 3 orang pengusaha kecil menengah dan 1 orang pegawai dinas Koperasi dan disebarkan kuesioner kepada 50 orang UMKM di kota Medan dengan menggunakan teknik bola salju. Teknik analisa data merupakan tahap penyederhanaan data. Data-data yang sudah terkumpul selanjutnya perlu dianalisis agar dapat memberikan informasi yang jelas. Pengolahan dengan penganalisaan data ini mempunyai tujuan untuk menjabarkan data yang diperoleh dari penelitian.

TELAAH PUSTAKA

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang mendasar yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia dewasa ini. Hal tersebut ditandai dengan adanya berbagai kekurangan dan ketidakberdayaan diri si miskin. Berbagai kekurangan dan ketidakberdayaan tersebut disebabkan baik faktor internal maupun eksternal yang membelenggu, seperti adanya keterbatasan untuk memelihara dirinya sendiri, tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhan dan lain-lain. Dengan begitu, segala aktivitas yang mereka lakukan untuk meningkatkan hidupnya sangat sulit (Hureirah : 2005).

Bentuk kemiskinan terbagi dua :

1. Kemiskinan Absolut : Suatu kemiskinan dimana orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan dibawah garis kemiskinan, atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, kebutuhan hidup minimum antara lain diukur dengan kebutuhan

pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan, kalori, GNP per kapita, pengeluaran konsumsi dan lain lain.

2. Kemiskinan Relatif : Suatu kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu tingkat pendapatan dengan tingkat pendapatan lainnya. Contohnya, seseorang yang tergolong kaya (mampu) pada masyarakat desa tertentu bisa jadi yang termiskin pada masyarakat desa yang lain.

Definisi kemiskinan dilihat dari beberapa segi :

1. Dilihat dari standar kebutuhan hidup yang layak/ pemenuhan kebutuhan pokok. Golongan ini mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok/ dasar disebabkan karena adanya kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk memenuhi standar hidup yang layak. Ini merupakan kemiskinan absolut/ mutlak yakni tidak terpenuhinya standar kebutuhan pokok/ dasar.
2. Dilihat dari segi pendapatan/ penghasilan/ *income* Kemiskinan oleh golongan ini dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan/ penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.
3. Dilihat dari segi kesempatan / *opportunity* Kemiskinan adalah karena ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi (meraih) basis kekuasaan sosial meliputi :
 - a. Ketrampilan yang memadai.
 - b. Informasi/ pengetahuan-pengetahuan yang berguna bagi kemajuan hidup.
 - c. Jaringan-jaringan sosial/ *social network*.
 - d. Organisasi-organisasi sosial dan politik.
 - e. Sumber-sumber modal yang diperlukan bagi peningkatan pengembangan kehidupan.
4. Dilihat dari segi keadaan/ kondisi Kemiskinan sebagai suatu kondisi/keadaan yang bisa dicirikan dengan :

- a. Kelaparan/ kekurangan makan dan gizi.
 - b. Pakaian dan perumahan yang tidak memadai.
 - c. Tingkat pendidikan yang rendah.
 - d. Sangat sedikitnya kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang pokok.
5. Dilihat dari segi penguasaan terhadap sumber-sumber

Menurut golongan ini kemiskinan merupakan keterlantaran yang disebabkan oleh penyebaran yang tidak merata dan sumber-sumber (*maldistribution of resources*), termasuk didalamnya pendapatan/ *income*.

Penyebab Kemiskinan

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan dalam dua hal berikut ini :

Faktor Internal (dari dalam diri individu)

Yaitu berupa kekurangmampuan dalam hal :

- a. Fisik misalnya cacat, kurang gizi, sakit-sakitan.
- b. Intelektual misalnya kurangnya pengetahuan, kebodohan, kekurangtahuan informasi.
- c. Mental emosional misalnya malas, mudah menyerah, putus asa temperamental.
- d. Spritual misalnya tidak jujur, penipu, serakah, tidak disiplin.
- e. Sosial psikologis misalnya kurang motivasi, kurang percaya diri, depresi/ stres, kurang relasi, kurang mampu mencari dukungan.
- f. Ketrampilan misalnya tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan permintaan lapangan kerja.
- g. Asset misalnya tidak memiliki stok kekayaan dalam bentuk tanah, rumah, tabungan, kendaraan dan modal kerja.

Faktor Eksternal (berada di luar diri individu atau keluarga) yang menyebabkan terjadinya kemiskinan antara lain

- a. Terbatasnya pelayanan sosial dasar.

- b. Tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah.
- c. Terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurang terlindunginya usaha-usaha sektor informal.
- d. Kebijakan perbankan terhadap layanan kredit mikro dan tingkat bunga yang tidak mendukung sektor usaha mikro.
- e. Belum terciptanya sistim ekonomi kerakyatan dengan prioritas sektor riil masyarakat banyak.
- f. Sistem mobilisasi dan pendayagunaan dana sosial masyarakat yang belum optimal seperti zakat.
- g. Dampak sosial negatif dari program penyesuaian struktural (*structural Adjustment Program/ SAP*).
- h. Budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan.
- i. Kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil atau daerah bencana.
- j. Pembangunan yang lebih berorientasi fisik material.
- k. Pembangunan ekonomi antar daerah yang belum merata.
- l. Kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin.

Indikator Kemiskinan

Untuk pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin maka diperlukan indikator yang lebih merefleksikan tingkat kemiskinan yang sesungguhnya di masyarakat. Indikator untuk menentukan fakir miskin tersebut ialah :

1. Penghasilan rendah atau berada dibawah garis sangat miskin yang diukur dari tingkat pengeluaran perorangan perbulan berdasarkan standar BPS per wilayah propinsi dan kabupaten/ kota.
2. Ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti zakat/ beras untuk miskin/ santunan sosial).
3. Keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga pertahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap perorang pertahun).

4. Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit.
5. Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit.
6. Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya.
7. Tidak memiliki harta (asset) yang dapat dimanfaatkan hasilnya atau dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan atau dua kali batas garis sangat miskin.
8. Ada anggota keluarga yang meninggal dalam usia muda atau kurang dari 40 tahun akibat tidak mampu mengobati penyakit sejak awal.
9. Ada anggota keluarga usia 15 tahun keatas yang buta huruf.
10. Tinggal dirumah yang tidak layak huni.
11. Luas rumah kurang dari 4 meter persegi.
12. Kesulitan air bersih.
13. Rumah tidak mempunyai sirkulasi udara.
14. Sanitasi lingkungan yang kumuh (tidak sehat).

Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah “membantu” komunitas dengan sumberdaya, kesempatan, keahlian, dan pengetahuan agar kapasitas komunitas meningkat sehingga dapat berpartisipasi untuk menentukan masa depan warga komunitas (Nasdian, 2006). Berarti pemberdayaan adalah bagaimana membuat komunitas bisa bekerja sendiri berdasarkan kemampuan yang telah mereka miliki. Tetapi sebelumnya kemampuan komunitas harus ditingkatkan agar mereka dapat berpartisipasi dan menyesuaikan diri dalam memenuhi kebutuhan sekarang dan nanti. Sehingga mereka dapat menentukan dan merancang masa depan mereka sendiri.

Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi bukan sebuah proses instan. Artinya, perlu ada suatu tahapan dimana setiap tahap terjadi proses perkembangan menuju

perbaikan. Proses tersebut memerlukan waktu yang relatif lama dan partisipasi menyeluruh dari komunitas itu sendiri. Tidak bisa dijadikan dalam waktu sehari atau hanya sekedar mengenalkan program ke komunitas, kemudian hilang sampai program berikutnya datang. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan: penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan (Randy & Riant, 2007).

Konsep Kewirausahaan

Wirausaha adalah seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya atau hidupnya. Ia bebas merancang, menentukan mengelola, mengendalikan semua usahanya.

Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau kreatif berdaya, bercrepta, berkarsa dan bersahaja dalam berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya (Amin, 2008). Wirausaha (enterpreneur) adalah seseorang yang membayar harga tertentu untuk produk tertentu, untuk kemudian dijualnya dengan harga yang tidak pasti, sambil membuat keputusan tentang upaya mencapai dan memanfaatkan sumber-sumber daya, dan menerima risiko (Winardi, 2003).

Kewirausahaan sebagaimana dikemukakan di atas disimpulkan secara umum merupakan harmonisasi antara kreativitas yang menciptakan ide-ide dengan pertimbangan peluang maupun resiko dan keinovasian dalam menerapkan ide-ide kreatif menjadi suatu bentuk barang dan jasa yang mempunyai nilai jual bagi wirausahawan. Membangun kewirausahaan berarti membangun atau menciptakan sesuatu yang baru. Kehidupan entrepreneur adalah kehidupan yang sangat ditentukan oleh pasar karena di situlah enterpreneur dan masyarakat

bertemu dan berinteraksi untuk saling memperkenalkan dan menjual barang dan jasa dan untuk saling menemukan kebutuhan akan barang dan jasa oleh masyarakat pembeli (Miraza, 2008). Seorang wirausahawan dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif, karena popularitas produk yang mungkin sukses dijualnya belum tentu bertahan lama.

Menurut Astamoen (2005) hal ini terjadi mengingat adanya daur hidup produk (product life cycle) terutama produk hasil industri yang melalui lima tahapan, yakni:

- 1) Tahapan desain dan pengembangan;
- 2) Tahapan pengenalan;
- 3) Tahapan pertumbuhan;
- 4) Tahapan pematangan dan kematangan;
- 5) Tahapan penurunan.

Dengan demikian setiap produk dari wirausaha akan mempunyai tahap penurunan permintaan pasar, maka dibutuhkan kreativitas dan inovasi dengan memahami konsep daur hidup melalui penciptaan produk-produk baru setiap kurun waktu tertentu sesuai jenis produknya, supaya tetap dapat eksis bersaing dan usahanya tetap berkembang. Kewirausahaan mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam berkreasi dan berinovasi, oleh sebab itu objek studi kewirausahaan adalah nilai-nilai dan kemampuan (ability) seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku (Suryana, 2001). Dengan sendirinya kreativitas dan inovasi merupakan suatu hal yang esensial bagi setiap pelaku dalam kewirausahaan di mana setiap proses perkembangan usaha mulai dari tahap awal sampai pada tahap penurunan dibutuhkan pemikiran kreatif dan inovatif terhadap produk yang dihasilkan.

Tujuannya agar suatu usaha dapat terus menghasilkan keuntungan sehingga dapat bersaing dengan mengikuti selera pasar (konsumen) untuk perkembangan suatu usaha terutama di bidang usaha kecil dan menengah yang mempunyai kapital kecil. Oleh karena itu,

wirausaha memerlukan ide-ide kreatif dan inovatif agar dapat efisien dan efektif dalam setiap tahapan. Tujuannya guna menekan penggunaan biaya yang bermuara kepada penekanan biaya produksi sehingga produk dapat dijual di pasar dengan harga terjangkau oleh konsumen.

Wirausaha adalah orang yang mengambil resiko dengan jalan membeli barang sekarang dan menjual kemudian dengan harga yang tidak pasti (*Cantillon*), kemudian J.B. Say mengemukakan "Wirausaha adalah orang yang memindahkan sumber-sumber ekonomi dari daerah dengan produktivitas rendah ke daerah dengan produktivitas dan hasil lebih tinggi". Selain itu, Schumpeter juga menyebutkan bahwa "wirausaha adalah orang yang menciptakan cara baru dalam mengorganisasikan proses produksi.

Dalam perannya wirausaha mempunyai peran untuk melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, bukan hanya sekadar dengan cara yang lebih baik untuk dapat mewujudkan suatu inovasi dari suatu produk dalam memproduksi suatu produk yang akan menciptakan nilai tambah dan membantunya dalam meningkatkan kesejahteraan baik dirinya maupun lingkungan di sekitarnya. Untuk lebih memahami tentang perspektif kewirausahaan sebaiknya kita memahami karakteristik daripada seorang pribadi wirausaha (Kashmir: 2006):

Karakteristik Pribadi Wirausaha

Sifat kepribadian wirausaha dipelajari guna mengetahui karakteristik perorangan yang membedakan seorang wirausaha dan bukan wirausaha. *David McClelland* mengindikasikan ada korelasi positif antara tingkah laku orang yang memiliki motif prestasi tinggi dengan tingkah laku wirausaha.

Karakteristik orang-orang yang mempunyai motif prestasi tinggi adalah:

1. Memilih resiko "moderate" Dalam tindakannya dia memilih melakukan sesuatu yang ada

tantangannya, namun dengan cukup kemungkinan untuk berhasil.

2. Mengambil tanggung jawab pribadi atas perbuatan-perbuatan. Artinya kecil sekali kecenderungan untuk mencari “*kambing hitam*” atas kegagalan atau kesalahan yang dilakukannya.
3. Mencari umpan balik (feed back) tentang perbuatan-perbuatannya.
4. Berusaha melakukan sesuatu dengan cara-cara baru.

Upaya untuk mengungkapkan karakteristik utama wirausaha juga dilakukan oleh para ahli dengan menggunakan teori letak kendali (*locus of control*) yang dikemukakan oleh J.B. Rotter. Teori letak kendali menggambarkan bagaimana meletakkan sebab dari suatu kejadian dalam hidupnya. Apakah sebab kejadian tersebut oleh faktor dalam dirinya dan dalam lingkup kendalinya atau faktor diluar kendalinya. Dua kategori letak kendali menurut Rotter yaitu:

- 1) *Internal* : Orang yang beranggapan bahwa dirinya mempunyai kendali atas apa yang akan dicapainya. Karakteristik ini sejalan dengan karakteristik wirausaha seperti lebih cepat mau menerima pembaharuan (inovasi).
- 2) *Eksternal* : Orang yang beranggapan keberhasilan tidak semata tergantung pada usaha seseorang, melainkan juga oleh keberuntungan, nasib, atau ketergantungan pada pihak lain, karena adanya kekuatan besar disekeliling seseorang.

Karakteristik Wirausaha tersebut merupakan suatu cerminan dari masyarakat yang menghendaki menjadi wirausaha sebagai jalan hidup mereka yang tentunya selain motivasi perekonomian yang dapat mensejahterakan dirinya dan masyarakat di lingkungan sekitar mereka, wira usaha juga mempunyai peran terhadap

lingkungan di sekitarnya. Berikut adalah peran wirausaha bagi lingkungannya.

Peran Wirausaha Bagi Lingkungannya

Dalam pandangan Schumpeter, seorang wirausaha adalah inovator. Hanya seseorang yang sedang melakukan inovasi yang dapat disebut sebagai wirausaha. Mereka yang tidak lagi melakukan inovasi, walaupun pernah, tidak dapat lagi dianggap sebagai wirausaha (Winardi : 2003). Wirausaha bukanlah jabatan, melainkan suatu peran.

Berdasarkan pengertian tentang wirausaha yang telah dibahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa peran wirausaha yang utama bagi lingkungannya adalah sebagai berikut:

- Memperbaharui secara kreatif. Dengan keberaniannya melihat dan mengubah apa yang sudah dianggap mapan, rutin, dan memuaskan.
- Inovator
Menghadirkan hal yang baru di masyarakat.
- Mengambil dan memperhitungkan resiko
- Mencari peluang dan memanfaatkannya
- Menciptakan organisasi baru

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha kecil menengah (UMKM) merupakan bagian terbesar dari pelaku bisnis di Indonesia yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan struktur perekonomian nasional. Oleh karena itu berbagai upaya pemberdayaan perlu terus dilakukan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. UMKM adalah usaha yang mempunyai modal awal yang kecil, atau nilai kekayaan (asset) yang kecil dan jumlah pekerja yang kecil (terbatas), nilai modal (asset) atau jumlah pekerjanya sesuai dengan definisi yang diberikan oleh pemerintah atau

institusi lain dengan tujuan tertentu. (Sukirno, 2004).

Jenis-Jenis UMKM

Secara umum UMKM bergerak dalam 2 (dua) bidang, yaitu bidang perindustrian dan bidang perdagangan barang dan jasa. Menurut Keppres No. 127 Tahun 2001, adapun bidang/ jenis usaha yang terbuka bagi usaha kecil dan menengah di bidang industri dan perdagangan adalah:

1. Industri makanan dan minuman olahan yang melakukan pengawetan dengan proses pengasinan, penggaraman, pemanisan, pengasapan, pengeringan, perebusan, penggorengan dan fermentasi dengan cara-cara tradisional.
2. Industri penyempurnaan benang dari serat alam maupun serat buatan menjadi benang bermotif/celup, ikat dengan menggunakan alat yang digunakan oleh tangan.
3. Industri tekstil meliputi pertenunan, perajutan, pematikan, dan pembordiran yang memiliki ciri dikerjakan dengan ATBM, atau alat yang digerakkan tangan termasuk batik, peci, kopiah, dsb.
4. Pengolahan hasil hutan dan kebun golongan non pangan: a. Bahan bangunan atau rumah tangga, bambu, nipah, sirap, arang, sabut.
5. Bahan industri: getah-getahan, kulit kayu, sutra alam, gambir.
6. Industri perkakas tangan yang diproses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan.
7. Industri perkakas tangan untuk pertanian yang diperlukan untuk persiapan lahan, proses produksi, pemanenan, pasca panen dan pengolahan, kecuali cangkul dan sekop.

8. Industri barang dari tanah liat, baik yang diglasir maupun yang tidak diglasir untuk keperluan rumah tangga.
9. Industri jasa pemeliharaan dan perbaikan yang meliputi otomotif, kapal dibawah 30 GT, elektronik dan peralatan rumah tangga yang dikerjakan secara manual atau semi otomatis.
10. Industri kerajinan yang memiliki kekayaan khasanah budaya daerah, nilai seni yang menggunakan bahan baku alamiah maupun imitasi.
11. Perdagangan dengan skala kecil dan informasi.

PEMBAHASAN

Peningkatan Kemampuan UMKM Dalam Memperoleh Sumber Modal

Dari hasil penelitian, dapat dianalisa bahwa secara konseptual Dinas Koperasi Kota Medan telah mengadakan temu kemitraan antara UMKM dengan lembaga keuangan bank / non bank. Kegiatan ini bertujuan agar UMKM dapat memperoleh pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Koperasi memperhatikan keluhan-keluhan dan masalah permodalan yang dialami oleh UMKM, sekaligus memberikan solusi agar UMKM dapat melaksanakan usahanya dengan baik. Namun demikian, frekuensi dari pertemuan tersebut sangat jarang sekali. Kurangnya seminar-seminar atau kegiatan mengenai pengadaan permodalan juga di kuatkan oleh jawaban responden yang dapat dilihat pada tabel 4.6, sehingga banyak UMKM yang kurang merasakan manfaat dari pelatihan tersebut.

Peningkatan Kualitas SDM UMKM

Rendahnya kualitas SDM UMKM pada umumnya disebabkan oleh jenjang pendidikan para pengusaha UMKM yang rata-

rata tamatan SMA. Hal ini menyebabkan UMKM memiliki kendala dibidang kelembagaan, seperti dalam penggunaan sistem akuntansi, pembukuan serta dalam manajemen usahanya.

Untuk itu berdasarkan pengamatan yang dilakukan, Dinas koperasi telah mengadakan seminar dan pelatihan mengenai masalah kelembagaan. Bahkan Pemerintah Kota Medan juga pernah melakukan semacam forum diskusi dan juga seminar yang melibatkan UMKM dan Disperindag serta kalangan akademis yang membahas kondisi UMKM saat ini serta mencari jalan keluar atas segala permasalahan yang menghambat perkembangan UMKM, terutama mengenai masalah kelembagaan dan kualitas SDM. Namun karena terbatasnya dana, kegiatan tersebut hanya dapat diikuti oleh sebagian UMKM saja, sehingga masih banyak UMKM yang kurang mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM nya.

Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan Tentang Pasar Dan Pemasaran Bagi UMKM

Pemasaran adalah proses yang paling penting dalam kemajuan setiap usaha. Begitu juga UMKM. Berbagai cara dilakukan agar pemasaran dapat memberikan kekuatan kepada UMKM untuk berkembang. Menyadari hal tersebut Dinas Koperasi Kota Medan menyelenggarakan berbagai pelatihan dan seminar mengenai pemasaran. Selain itu untuk meningkatkan pemasaran, Dinas Koperasi juga melibatakan UMKM-UMKM untuk mengikuti pameran atau promosi prodak yang digunakan sebagai sarana promosi dan uji pasar bagi produk-produk UMKM. Biasanya kegiatan pameran tersebut diadakan pada sebuah perayaan, seperti pada saat Pekan Raya Sumatera Utara ataupun Medan Fair. Dengan demikian kegiatan tersebut akan meningkatkan omset penjualan UMKM.

Dari hasil penelitian, didapatkan informasi bahwa Dinas Koperasi benar-benar memaksimalkan sarana promosi dan uji pasar dalam mengembangkan jaringan pemasaran UMKM. Hal ini terlihat dengan pameran yang mengikutsertakan UMKM sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk memperkenalkan prodak dan sekaligus melakukan kegiatan jual-beli antara UMKM dengan konsumen. Namun dibalik manfaat besar dari diadakannya pameran prodak UMKM, diketahui bahwa UMKM menginginkan intensitas pelaksanaan pameran agar ditingkatkan, karena pameran yang selama ini diikuti hanya apabila ada festival saja. Dan berangkat dari kegiatan ini diharapkan jaringan pemasaran UMKM dapat semakin berkembang luas.

Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Produksi Dan Pemasaran Prodak

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat sudah merambah kesegala sisi kehidupan yang semakin mempermudah manusia dalam melakukan sesuatu. Dan hal ini sudah sewajarnya harus dimanfaatkan untuk lebih mendukung peningkatan produksi dan pengembangan pasar UMKM yang selama ini hanya memanfaatkan pasar yang telah tersedia.

Dalam hal pemanfaatan dibidang teknologi untuk meningkatkan produksi barang dan mendukung pengembangan pasar, Penulis melihat bahwa Dinas Koperasi Kota Medan telah benar-benar menyadari pentingnya pemanfaatan teknologi tersebut. Misalnya dengan mengadakan pelatihan dan pengarahan mengenai pemanfaatan teknologi dengan sarana internet untuk meningkatkan pemasaran, ataupun mengusulkan kepada UMKM untuk menggunakan teknologi mesin untuk menghasilkan produksi dengan waktu yang singkat dan kualitas yang lebih baik (misalnya penggunaan mesin jahit listrik atau mesin bordir dengan pengoperasian komputer).

Walaupun penggunaan teknologi tersebut sangat membantu UMKM untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi serta mengembangkan pemasaran, namun jika kita mengingat kembali akan keterbatasan modal yang dimiliki UMKM untuk menggunakan teknologi tersebut, banyak dari responden (UMKM) menyatakan tidak langsung menggunakan teknologi yang diberikan oleh Dinas Koperasi Kota Medan . Selain harganya mahal keterbatasan kemampuan UMKM untuk memanfaatkan teknologi tersebut masih kurang, karena kebanyakan pengusaha UMKM berpendidikan SMA yang masih memiliki keterampilan yang minim. Selain itu kurangnya frekuensi pelatihan mengenai penggunaan teknologi yang diadakan oleh Dinas Koperasi menyebabkan kurangnya pengetahuan UMKM untuk memanfaatkan teknologi .

Kemitraan Antara UMKM Dengan Usaha Besar

Konsep kemitraan dalam pembangunan UMKM di Indonesia setidaknya mulai dicanangkan oleh pemerintah setelah berlakunya UU No.9 Tahun 1995 tentang Usaha kecil dan Inpres No. 10 Tahun 1998 tentang Usaha Menengah. Sejak itu, harapan untuk iklim usaha dan pembangunan daya tumbuh UMKM mulai muncul karena pola kemitraan diciptakan untuk mengatasi minimnya kapasitas UMKM dalam meningkatkan usahanya.

Dengan dibangunnya pola kemitraan antara UMKM dengan Usaha Besar, diharapkan dapat menghindari kesenjangan antara UMKM dengan usaha besar guna membangun keseimbangan usaha. Dan lebih dari itu kemitraan menjadi alat perekat kemandirian ekonomi bangsa guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi rakyat.

Dari hasil penelitian, Penulis menganalisis bahwa Dinas Koperasi Kota Medan telah merealisasikan kegiatan ini dengan memfasilitasi pertemuan antara UMKM dengan usaha besar yang diharapkan terjalin hubungan bisnis yang saling menguntungkan dan dalam pengembangan pemasaran, UMKM sangat diuntungkan mengingat bahwa jangkauan pemasaran usaha besar pasti lebih luas karena didukung oleh akses informasi pasar yang lebih baik dan mapan dari UMKM. Apa yang telah dilakukan Dinas Koperasi Kota Medan dalam membangun pola kemitraan sebenarnya telah memberikan jalan keluar yang baik bagi UMKM untuk mengembangkan pemasaran mereka, namun usaha tersebut tidak diikuti kontrol dari Dinas Koperasi terhadap kemitraan yang terjalin. Sehingga pola kemitraan tersebut nantinya tidak merugikan UMKM ataupun usaha besar yang bersangkutan. Dengan demikian Dinas Koperasi Kota Medan telah berhasil membangun pola kemitraan antara UMKM dengan usaha besar.

Manfaat

Jika ditinjau dari aspek manfaat, maka suatu kegiatan dikatakan berhasil apabila kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian pelaksanaan program pengembangan UMKM dikatakan efektif jika program pengembangan tersebut memberikan manfaat kepada UMKM khususnya. Secara umum, manfaat dari pengembangan UMKM adalah : terjadinya perkembangan modal, terjadinya peningkatan kualitas SDM, terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi yang dihasilkan, terjadinya peningkatan omset / penjualan serta terjadinya perluasan saluran pemasaran. Jika manfaat tersebut diatas dapat dirasakan oleh UMKM, maka kesejahteraan UMKM akan meningkat dari segi ekonomi, pendidikan dan juga kesehatan.

Namun berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, masih banyak UMKM yang kurang merasakan manfaat program pengembangan tersebut. Hal ini dikarenakan keterbatasan seminar dan pelatihan yang mereka ikuti serta adanya anggapan dari beberapa UMKM bahwa seminar dan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Kota Medan hanya sebatas sosialisasi saja dan kurang menyentuh permasalahan UMKM yang sesungguhnya. Selain itu terkesan ada diskriminasi dari pihak Dinas Koperasi dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut, misalnya dalam penentuan UMKM mana saja yang diberi kesempatan untuk mengikuti seminar-seminar dan pelatihan, apalagi hanya UMKM yang unggul saja yang dikirim untuk melaksanakan studi banding, sehingga UMKM-UMKM lainnya tidak merasakan hal yang sama untuk memperoleh pengetahuan.

Kurangnya informasi mengenai pasar juga menyebabkan UMKM kurang mengetahui kondisi pasar, sehingga kesempatan untuk memperluas saluran pemasaran sangat kecil sekali. Dan juga kurangnya kegiatan pengevaluasian atau penilaian terhadap setiap pelatihan atau seminar yang diselenggarakan menunjukkan tidak adanya tindak lanjut yang signifikan dari Dinas Koperasi. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena Dinas Koperasi masih memiliki kekurangan anggaran untuk melakukan kegiatan tersebut. Tetapi sedikit banyaknya pelaksanaan kegiatan program pengembangan UMKM tersebut sudah memberikan dampak positif untuk perkembangan UMKM di kota Medan, walaupun belum mencapai target atau sasaran yang telah direncanakan

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengembangan UMKM sudah berjalan dengan baik namun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Artinya walaupun Dinas Koperasi Kota Medan telah benar-benar menganggap penting program pengembangan UMKM dengan mengadakan berbagai kegiatan untuk mewujudkan tujuan program tersebut, namun masih ada UMKM yang kurang merasakan manfaat dari program tersebut.
2. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya berbagai kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi untuk mengembangkan UMKM, seperti seminar dan pelatihan.

Saran

1. Diharapkan Dinas Koperasi Kota Medan terus melakukan perbaikan terhadap program yang dirancang, baik dalam program pengembangan UMKM maupun kegiatan lainnya dengan melihat permasalahan yang dialami oleh UMKM tersebut sehingga UMKM dapat berkembang lebih baik lagi
2. Kedepannya Dinas Koperasi tidak hanya mengikutsertakan UMKM-UMKM unggul saja dalam program ataupun kegiatannya, melainkan juga memberikan kesempatan yang lebih banyak lagi kepada UMKM-UMKM di kota Medan untuk dapat mengikuti seminar atau pelatihan yang ada
3. Agar Dinas Koperasi turut mengontrol pola kemitraan yang terjalin antara UMKM dengan usaha Besar sehingga bisa memberikan keuntungan bukan untuk satu pihak saja, namun keuntungan untuk kedua belah pihak
4. Agar kedepannya Dinas koperasi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia ke arah yang lebih profesional

dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para pegawai, sehingga mampu memberikan kualitas pelatihan yang lebih baik lagi kepada UMKM

5. Agar para pemilik atau pengelola UMKM lebih meningkatkan kemauan dan kesadarannya untuk menjalankan usahanya dengan bekal program-program atau kegiatan yang telah diberikan oleh Dinas Koperasi Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkadri, Muchdie, Suhandoyo. (eds.). 2001. *Tiga Pilar Pengembangan Wilayah Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Teknologi*, Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah.
- Astamoen, P. Moko. 2005. *Entrepreneurship*. Penerbit Alfabeta. Jakarta
- Bappenas, 2004. *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta
- Hureirah, A, 2005, *Strategi Penanggulangan Kemiskinan*, Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAS-LSM Mata Air (Masyarakat Cinta Tanah Air), Bandung
- Soehartomo, Irawan. 2004. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rasda Karya.
- Soekidjo. 1999. *Pengembangan Potensi Wilayah*, Jakarta: Penerbit Gramedia Grup.
- Sukirno, Sadono, 2004, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Rajawali Press
- Winardi, J. 2003. *Entrepreneur dan Entrepreneurship*. Penerbit Kencana Prenada.